

Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli

I Dewa Ayu Indah Saputri¹, I Ketut Sunarwijaya^{2*}, Ni Putu Lisa Ernawatiningsih³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

*Email: iksunarwijaya@unmas.ac.id

ABSTRACT

LPD must apply the GCG Principles with the aim that there are no weak LPD or weak mental health of LPD administrators and human resources. By applying the GCG Principles, the performance of an LPD will run well. the purpose of conducting this research was to determine the effect of GCG principles on the performance of LPD in Tembuku District, Bangli Regency. This finding uses a quantitative approach. The research location is a targeted sample of 108 LPD employees in Bangli. Research data uses a questionnaire to collect answers from respondents. because it uses primary data according to the sample criteria determined by the technique used purposive sampling. These findings reveal that partially the variables of accountability, independence and fairness have an influence on the dependent variable, while the first and third hypotheses are rejected.

Keywords: *Transparansi, Accountability, Responsibility, Independenci, fairness Performance LPD*

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, Lembaga Perkreditan Desa yang disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman. Lembaga Perkreditan Desa diperlukan keberadaannya untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang merupakan Krama Desa Pakraman. Lembaga Perkreditan Desa telah memberikan manfaat baik secara ekonomi, sosial, dan budaya kepada Krama Desa Pakraman perlu ditingkatkan tata kelolanya sebagai lembaga keuangan milik Desa Pakraman.

Kinerja LPD dipengaruhi oleh kemampuan dalam menangani berbagai risiko yang dihadapi, kelemahan dalam penanganan atau pengelolaan risiko LPD akan berpengaruh negatif terhadap kinerja LPD. Dari segi pengelolaannya Desa Pakraman mendelegasikan tugas pengelolaan LPD kepada pengurus LPD yang bertindak sebagai agen. Adanya hubungan keagenan antara krama Desa Pakraman dengan pengelola LPD memungkinkan timbulnya permasalahan-permasalahan seperti konflik kepentingan. Kemampuan untuk mencapai keberhasilan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap LPD dapat dilakukan dengan menunjukkan kinerja LPD serta diperlukan formula yang baik dalam mengelola sumber daya yang dimiliki (Surmika, dkk 2019). Menurut Harlis (2015:15) kinerja merupakan hasil-hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang maupun kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu.

Fenomena yang terjadi pada LPD Kecamatan tembuku, Kabupaten Bangli, yaitu terdapat LPD yang dinyatakan macet, salah satu LPD yang dinyatakan macet adalah LPD Undisan Kelod, Kata Alit Miasa (2020) banyak faktor penyebab sebuah LPD sampai macet atau tidak beroperasi diantaranya karena kredit bermasalah. “*Problem* kredit macet juga salah satu penyebab sebuah LPD kolaps,” kata mantan Sekretaris Dinas Perhubungan Bangli. Selain itu juga lemahnya atau kurang sehatnya mental pengurus LPD dan lemahnya sumber daya manusianya. Disamping itu faktor kurangnya sarana dan prasarana dan lemahnya sektor permodalan juga menjadi salah satu faktor penyebab matinya LPD,” jelas Alit Miasa selaku kabag ekonomi setda Bangli.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang pertama yang mempengaruhi Kinerja LPD

adalah transparansi. Permendagri No 13 tahun 2014, tentang pedoman Pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Menurut Anggriawan dan Kawisana (2020) menyatakan transparansi berpengaruh positif pada kinerja keuangan dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi dan Putri (2014) menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG berpengaruh pada kinerja keuangan LPD Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Irwondy (2014) dan penelitian Handayani, dkk (2020) yang menyatakan bahwa Transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD. Hal ini menunjukkan bahwa ketidak transparanan LPD dalam hal mengungkapkan informasinya, tidak mempengaruhi kepercayaan stakeholder dalam hal ini krama desa terhadap pengurus LPD. Hal tersebut disebabkan karena kinerja LPD sudah optimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri dan Putra (2017) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang kedua yang mempengaruhi Kinerja LPD adalah akuntabilitas. Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pemerintahan RI Tahun 2011, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggung jawaban. Menurut Pradnya dan Putri (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif pada kinerja keuangan koperasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Bulandari dan Damayanti (2014), Dewi dan Dwijayanti (2014) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Namun hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Bukhori (2012) bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh pada kinerja LPD. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suarmika, dkk (2019) yang menyatakan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh pada kinerja LPD. Walaupun penerapan prinsip ini dapat dikatakan cukup baik, nyatanya masih belum dapat mendorong peningkatan kinerja LPD, sehingga perlu dilakukan peningkatan dalam proses penerapan prinsip ini secara berkelanjutan, sehingga diharapkan akan berdampak pada peningkatan kinerja LPD.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang ketiga yang mempengaruhi Kinerja LPD adalah responsibilitas. Menurut Monossoh (2016) Prinsip dasar dalam asas responsibilitas adalah bahwa Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Menurut Anggriawan dan Kawisana (2020) yang menyatakan responsibility berpengaruh positif. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Setyawan dan Putri (2013), Bulandari dan Damayanti (2014) yang menyatakan bahwa responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Namun hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suarmika, dkk (2019), Ariani, dkk (2020) yang menyatakan responsibilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang keempat yang mempengaruhi Kinerja LPD adalah independensi. Dalam proses kelancaran penerapan prinsip-prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen, sehingga organisasi perusahaan saling independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Menurut Handayani, dkk (2020) yang menyatakan Independensi berpengaruh Positif terhadap Kinerja LPD. Hal ini menunjukkan bahwa jika dalam mengelola LPD pengurus LPD mengambil keputusan yang objektif (bebas dari kepentingan berbagai pihak)

dan dapat menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun maka sikap tersebut dapat meningkatkan kinerja Lembaga Perkreditan Desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Setyawan dan Putri (2013), Dewi dan Dwijayanti (2014), Bulandari dan Damayanti (2014) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Namun menurut Ariani, dkk (2020) mengatakan bahwa Independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa se Kota Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa LPD dalam pengelolaan lembaganya masih terpengaruh pihak lain/krama desa selaku pemegang saham. LPD diwajibkan melibatkan krama desa dalam pengambilan keputusan dengan mengadakan pararem dengan prajuru desa sebagai perwakilan krama desa. Dengan memberikan pelatihan dan pengembangan diri serta evaluasi kerja bagi para pegawai LPD diharapkan mampu meningkatkan kinerja serta sistem pelayanan dapat berjalan dengan lancar dan terbebas dari pengaruh pihak yang merugikan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan dengan penelitian yg dilakukan oleh Dewi dan Yadnyana (2020), Novitasari dan wardipa (2021), bahwa Independensi tidak berpengaruh terhadap Kinerja LPD.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang kelima yang mempengaruhi Kinerja LPD adalah kewajaran. Dalam menjalankan kegiatannya perusahaan harus mengikuti prinsip kewajaran dan kesetaraan serta selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut Ariani, dkk (2020) menunjukkan bahwa Fairness/kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa. Hal ini menunjukkan bahwa LPD harus senantiasa memperhatikan hak-hak para pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan kinerja LPD kearah yang lebih baik. Penelitian ini sejalan dengan Anggiriawan dan Kawisana (2020), Ardiani, dkk (2021) yang mengatakan bahwa kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD. Namun menurut Suarmika, dkk (2019) menunjukkan bahwa kewajaran tidak berpengaruh pada kinerja LPD. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip kewajaran pada LPD dapat dikatakan cukup baik. Kewajaran yang dimaksud yaitu memberikan kesempatan yang sama para krama Desa atau anggota LPD untuk memberikan masukan dan pendapat pada LPD, memberikan perlakuan adil kepada semua anggota serta memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan LPD bagi krama Desa. Tetapi walaupun penerapan prinsip ini dapat dikatakan cukup baik, nyatanya masih belum dapat mendorong peningkatan kinerja LPD, sehingga perlu dilakukan peningkatan dalam proses penerapan prinsip ini secara berkelanjutan, sehingga diharapkan akan berdampak pada peningkatan kinerja LPD. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Dian (2012), Dewi dan Yadnyana (2020) yang menyatakan kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD

Berdasarkan uraian diatas karena terdapat tidak konsistennya hasil penelitian maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja LPD Di Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli”. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran pada Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi data untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait prinsip-prinsip GCG terhadap Kinerja LPD. Dari perusahaan sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan awal untuk menentuka sebuah pertimbangan bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja LPD

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency theory*)

Teori Keagenan (*Agency theory*) adalah teori yang menjelaskan *agency relationship* dan masalah-masalah yang ditimbulkannya. Konsep teori keagenan (*agency theory*) menurut

Supriyono (2018:63) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. *Agency relationship* merupakan hubungan antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai prinsipal/pemberi amanat dan pihak kedua disebut agen yang bertindak sebagai perantara yang mewakili *principal* dalam melakukan transaksi dengan pihak ketiga.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa

Prinsip-prinsip GCG salah satunya transparansi yaitu untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Anggiriawan dan Kawisana (2020), Dewi dan Putri (2014), Bulandari dan Damayanthi (2014) yang menyatakan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja LPD. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suarmika, dkk. (2019) yang menyatakan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja LPD. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik transparansi maka kinerja LPD akan semakin baik.

H1: Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa **Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa.**

Akuntabilitas (*accountability*) Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Menurut Sudarmanto, dkk. (2021:8) Konsep ini diperlukan untuk melihat sejauh mana kinerja yang telah dihasilkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini suatu kinerja haruslah dapat dikelola dengan tepat dan terukur untuk melihat seberapa jauh kesinambungan antara proses perencanaan, organisir, pelaksanaan serta evaluasi yang dilakukan dengan tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Dalam penelitian Pradnya dan Putri (2016) menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif pada kinerja keuangan koperasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Bulandari dan Damayanti (2014), Dewi dan Dwijayanti (2014) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas maka kinerja LPD akan semakin baik. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang didapatkan adalah sebagai berikut :

H2: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa.

Pengaruh Responsibilitas Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa

Pertanggungjawaban (*responsibility*) Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Hal ini berarti tinggi atau rendahnya responsibilitas tidak akan mempengaruhi Kinerja LPD ini dikarenakan sistem dan Sumber Daya Manusia yang mendukung kinerja sudah baik dan canggih. Menurut Sudarmanto, dkk. (2021:8-9) Konsep ini merefleksikan tanggung jawab setiap individu maupun organisasi perusahaan dalam mematuhi segala tugas-tugas dalam pekerjaan, aturan-aturan serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu organisasi atau perusahaan. Dalam penelitian Anggiriawan dan Kawisana (2020) menyatakan responsibility berpengaruh positif. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Setyawan dan Putri (2013), Bulandari dan Damayanti (2014), Handayani, dkk. (2020) yang menyatakan bahwa responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik responsibilitas maka kinerja LPD akan semakin baik. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang didapatkan adalah sebagai

berikut :

H3: Responsibilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa. Pengaruh Independensi Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa

Independensi (independency) Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Menurut Monossoh (2016:26) Prinsip dasar untuk melancarkan pelaksanaan asas independensi, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pelaksanaan asas ini adalah bahwa masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Kemudian, masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain. Dalam Penelitian Handayani, dkk (2020) yang menyatakan Independensi berpengaruh Positif terhadap Kinerja LPD. Hal ini menunjukkan bahwa jika dalam mengelola LPD pengurus LPD mengambil keputusan yang objektif (bebas dari kepentingan berbagai pihak) dan dapat menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun maka sikap tersebut dapat meningkatkan kinerja Lembaga Perkreditan Desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Setyawan dan Putri (2013), Dewi dan Dwijayanti (2014), Bulandari dan Damayanti (2014), Sandraningsih dan Putri (2015) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik independensi maka kinerja LPD akan semakin baik. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang didapatkan adalah sebagai berikut :

H4: Independensi berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa. Pengaruh Kewajaran Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa

Menurut Monossoh (2016:26) Prinsip dasar berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Dalam pelaksanaan prinsip ini, Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup 27 kedudukan masing-masing. Juga, perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

Dalam Penelitian Ariani, dkk (2020) menunjukkan bahwa Fairness/kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa. Hal ini menunjukkan bahwa LPD harus senantiasa memperhatikan hak-hak para pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan kinerja LPD kearah yang lebih baik. Penelitian ini sejalan dengan Anggiriawan dan Kawisana (2020), Ardiani, dkk (2021) yang mengatakan bahwa kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kewajara maka kinerja LPD akan semakin baik. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang didapatkan adalah sebagai berikut :

H5: Kewajaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di LPD (Lembaga Perkreditan Desa) yang berada di wilayah Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. Populasi dalam penelitian ini adalah semua Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tembuku yang berjumlah 36 Lembaga Perkreditan Desa. Penelitian ini menggunakan metode penentuan sampel yaitu purposive sampling. Dalam

penelitian ini, kriteria sampel yang digunakan adalah seluruh LPD yang berada di Kecamatan Tembuku dengan mengambil tiga responden pada masing-masing LPD dan LPD yang masih aktif atau LPD yang tidak sedang dalam kondisi bermasalah.

dari 36 LPD yang masih beroperasi, maka penyebaran kuesioner dilakukan kepada ketua LPD, 1 staf, 1 badan pengawas di masing-masing LPD Kecamatan Tembuku sehingga responden dalam penelitian ini adalah 108 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Transparansi yaitu pengelola LPD menyampaikan seluruh informasi yang ada dan tanpa ada yang ditutupi. Variabel transparansi dalam penelitian ini diukur dengan indikator yang mengacu pada penelitian Krisnayani, (2019) yaitu: Prinsip akuntansi yang berlaku umum, pedoman akuntansi, teknologi informasi, Manajemen risiko. Variabel ini diukur menggunakan skala likert dengan lima pernyataan dan lima alternatif jawaban yang disediakan dengan nilai 1 Sangat Tidak Setuju (STS), 2 Tidak Setuju (TS), 3 Kurang Setuju (KS), 4 Setuju (S), 5 Sangat Setuju (SS).

Akuntabilitas yaitu pengelola LPD harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan transparan. Variabel akuntabilitas dalam penelitian ini diukur dengan indikator yang mengacu pada penelitian Krisnayani, (2019) yaitu: Sistem pengendalian internal, Pengawasan internal, *Key performance indicator*. Variabel ini diukur menggunakan skala likert dengan lima pernyataan dan lima alternatif jawaban yang disediakan nilai 1 Sangat Tidak Setuju (STS), 2 Tidak Setuju (TS), 3 Kurang Setuju (KS), 4 Setuju (S), 5 Sangat Setuju (SS).

Responsibilitas yaitu pengelola LPD harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat. Variabel responsibilitas dalam penelitian ini diukur dengan indikator yang mengacu pada penelitian Krisnayani, (2019) yaitu: Kegiatan social LPD, Anggaran LPD, Penerapan standar profesional etika, Hubungan LPD dengan pesaing. Variabel ini diukur menggunakan skala likert dengan lima pernyataan dan lima alternatif jawaban yang disediakan dengan nilai 1 Sangat Tidak Setuju (STS), 2 Tidak Setuju (TS), 3 Kurang Setuju (KS), 4 Setuju (S), 5 Sangat Setuju (SS).

Independensi, pengelola LPD dalam melaksanakan kegiatannya harus independen atau tidak terikat pihak manapun. Variabel independen dalam penelitian ini diukur dengan indikator yang mengacu pada penelitian Krisnayani, (2019) yaitu: Tenaga ahli LPD, Pelaksanaan LPD secara independen, Aktivitas LPD, Kebijakan intern LPD. Variabel ini diukur menggunakan skala likert dengan lima pernyataan dan lima alternatif jawaban yang disediakan dengan nilai 1 Sangat Tidak Setuju (STS), 2 Tidak Setuju (TS), 3 Kurang Setuju (KS), 4 Setuju (S), Sangat Setuju (SS).

Kewajaran, pengelola LPD harus senantiasa memperhatikan hak-hak semua pihak. Variabel kewajaran dalam penelitian ini diukur dengan indikator yang mengacu pada penelitian Krisnayani, (2019) yaitu: Pemahaman visi, misi, dan tujuan LPD, Pelibatan karyawan LPD. Penyelesaian konflik. Variabel ini diukur menggunakan skala likert dengan lima pernyataan dan lima alternatif jawaban yang disediakan dengan nilai 1 Sangat Tidak Setuju (STS), 2 Tidak Setuju (TS), 3 Kurang Setuju (KS), 4 Setuju (S), 5 Sangat Setuju (SS).

Kinerja Lembaga Perkreditan Desa merupakan aset milik desa adat yang nantinya dapat dipergunakan sebagai penyangga dalam melaksanakan aktivitas pembangunan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Variabel kinerja LPD dalam penelitian ini diukur dengan indikator yang mengacu pada penelitian Krisnayani, (2019) yaitu: Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, Perspektif proses bisnis internal, Perspektif pelanggan. Variabel ini diukur menggunakan skala likert dengan lima pernyataan dan lima alternatif jawaban yang disediakan dengan nilai 1 Sangat Tidak Setuju (STS), 2 Tidak Setuju (TS), 3 Kurang Setuju (KS), 4 Setuju (S), 5 Sangat Setuju (SS).

Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi linier berganda, adapun persamaan regresi yang digunakan adalah :

$$KLPD = \alpha + \beta_1TR + \beta_2AK + \beta_3RP + \beta_4IN + \beta_5KW + \epsilon \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- KLDP = Kinerja Lembaga Perkreditan Desa
 α = Konstanta
 β_1 - β_5 = Koefisien regresi
TR = Transparansi
AK = Akuntabilitas
RP = Responsibilitas
IN = Independensi
KW = Kewajaran
 ε = Error term

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TR	108	15.00	20.00	18.8704	1.47308
AK	108	11.00	15.00	13.2870	1.23084
RP	108	12.00	19.00	16.6296	1.66656
IN	108	14.00	20.00	17.6296	1.80131
KW	108	11.00	15.00	13.4907	1.13150
KL	108	35.00	45.00	41.0093	2.79015
Valid N (listwise)	108				

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa jumlah responden (N) dalam penelitian ini adalah 108 orang. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Variabel Transparansi (TR) memiliki nilai minimum sebesar 15.00 dan nilai maksimum sebesar 20.00 dengan nilai rata-rata sebesar 18.8704 serta standar deviasi sebesar 1.47308. Hal ini menunjukkan hasil statistik deskriptif terjadi perbedaan nilai transparansi yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 18.8704.
- 2) Variabel Akuntabilitas (AK) memiliki nilai minimum sebesar 11.00 dan nilai maksimum sebesar 15.00 dengan nilai rata-rata sebesar 13.2870 serta standar deviasi sebesar 1.23084. Hal ini menunjukkan hasil statistik deskriptif terjadi perbedaan nilai akuntabilitas yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 13.2870.
- 3) Variabel Responsibilitas (RP) memiliki nilai minimum sebesar 12.00 dan nilai maksimum sebesar 19.00 dengan nilai rata-rata sebesar 16.6296 serta standar deviasi sebesar 1.66656. Hal ini menunjukkan hasil statistik deskriptif terjadi perbedaan nilai responsibilitas yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 16.6296.
- 4) Variabel Independensi (IN) memiliki nilai minimum sebesar 14.00 dan nilai maksimum sebesar 20.00 dengan nilai rata-rata sebesar 17.6296 serta standar deviasi sebesar 1.80131. Hal ini menunjukkan hasil statistik deskriptif terjadi perbedaan nilai independensi yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 17.6296.
- 5) Variabel Kewajaran (KW) memiliki nilai minimum sebesar 11.00 dan nilai maksimum sebesar 15.00 dengan nilai rata-rata sebesar 13.4907 serta standar deviasi sebesar 1.13150. Hal ini menunjukkan hasil statistik deskriptif terjadi perbedaan nilai kewajaran yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 13.4907
- 6) Variabel Kinerja LPD (KL) memiliki nilai minimum sebesar 35.00 dan nilai maksimum sebesar

45.00 dengan nilai rata-rata sebesar 41.0093 serta standar deviasi sebesar 2.79015. Hal ini menunjukkan hasil statistik deskriptif terjadi perbedaan nilai kinerja LPD yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 41.0093.

Uji Validitas Instrumen

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	Indikator	Correlation Coefficient	Ket
Transparansi (X1)	TR1	0,850	<i>Valid</i>
	TR2	0,709	<i>Valid</i>
	TR3	0,840	<i>Valid</i>
	TR4	0,746	<i>Valid</i>
Akuntabilitas (X2)	AK1	0,866	<i>Valid</i>
	AK2	0,924	<i>Valid</i>
	AK3	0,595	<i>Valid</i>
Responsibilitas (X3)	RP1	0,584	<i>Valid</i>
	RP2	0,843	<i>Valid</i>
	RP3	0,690	<i>Valid</i>
	RP4	0,679	<i>Valid</i>
Indenpedensi (X4)	IN1	0,779	<i>Valid</i>
	IN2	0,707	<i>Valid</i>
	IN3	0,777	<i>Valid</i>
	IN4	0,784	<i>Valid</i>
Kewajran (X5)	KW1	0,854	<i>Valid</i>
	KW2	0,919	<i>Valid</i>
	KW3	0,956	<i>Valid</i>
Kinerja (Y)	KL1	0,661	<i>Valid</i>
	KL2	0,797	<i>Valid</i>
	KL3	0,731	<i>Valid</i>
	KL4	0,427	<i>Valid</i>
	KL5	0,679	<i>Valid</i>
	KL6	0,749	<i>Valid</i>
	KL7	0,577	<i>Valid</i>
	KL8	0,810	<i>Valid</i>
	KL9	0,809	<i>Valid</i>

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan untuk menjelaskan variabel penelitian dinyatakan valid karena berdasarkan uji validitas di atas menunjukkan nilai Pearson Correlation di atas 0,3.

Uji Realibilitas Data

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	Alpha Cronbach	Ket
Transparansi (X1)	0,787	<i>Reliabel</i>

Akuntabilitas (X2)	0,731	Reliabel
Responsibilitas (X3)	0,705	Reliabel
Indenpedensi (X4)	0,752	Reliabel
Kewajran (X5)	0,888	Reliabel
Kinerja (Y)	0,880	Reliabel

Sumber : Data diolah (2022)

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa semua variabel menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha diatas 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.085	2.068		4.878	.000
	TR	.152	.142	.072	1.071	.287
	AK	.329	.160	.130	2.056	.042
	RP	.174	.149	.093	1.171	.244
	IN	.579	.139	.335	4.156	.000
	KW	.806	.134	.412	6.013	.000

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh suatu persamaan regresi berganda sebagai berikut:
 $KL=10,085+0,152TR+0,329AK+0,174RP+0,579 IN+0,806KW.....(2)$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (α) sebesar 10,085. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Transparansi (TR), Akuntabilitas (AK), Responsibilitas (RP), Indenpendensi (IN), dan Kewajran (KW) sama dengan nol atau konstan, maka nilai variabel efektivitas sistem informasi akuntansi adalah sebesar adalah sebesar 10,085.
2. Koefisien regresi Transparansi (TR) sebesar 0,152 dengan nilai signifikan sebesar 0,287 yang artinya $0,287 > 0,05$ maka transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja lembaga perkreditan desa.
3. Koefisien regresi Akuntabilitas (AK) sebesar 0,329 dengan nilai signifikan sebesar 0,042 yang artinya $0,042 < 0,05$ maka akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja lembaga perkreditan desa. Hal ini berarti bahwa jika akuntabilitas naik satu satuan maka kinerja lembaga perkreditan desa naik sebesar 0,329 dengan asumsi semua variabel bebas lainnya adalah konstan.
4. Koefisien regresi Responsibilitas (TR) sebesar 0,174 dengan nilai signifikan sebesar 0,244 yang artinya $0,244 > 0,05$ maka responsibilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja lembaga perkreditan desa.
5. Koefisien regresi Independensi (IN) sebesar 0,579 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang artinya $0,000 < 0,05$ maka independensi berpengaruh positif terhadap kinerja lembaga

perkreditan desa. Hal ini berarti bahwa jika independensi naik satu satuan maka kinerja lembaga perkreditan desa naik sebesar 0,579 dengan asumsi semua variabel bebas lainnya adalah konstan.

- Koefisien regresi kewajaran (KW) sebesar 0,806 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang artinya $0,000 < 0,05$ maka kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja lembaga perkreditan desa. Hal ini berarti bahwa jika kewajaran naik satu satuan maka kinerja lembaga perkreditan desa naik sebesar 0,806 dengan asumsi semua variabel bebas lainnya adalah konstan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		108
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.50673631
Most Extreme Differences	Absolute	.083
	Positive	.053
	Negative	-.083
Test Statistic		.083
Asymp. Sig. (2-tailed)		.063 ^c

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,063 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model residual data berdistribusi normal.

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	10.085	2.068		4.878	.000		
	TR	.152	.142	.072	1.071	.287	.510	1.961
	AK	.329	.160	.130	2.056	.042	.574	1.744
	RP	.174	.149	.093	1.171	.244	.363	2.758
	IN	.579	.139	.335	4.156	.000	.353	2.832
	KW	.806	.134	.412	6.013	.000	.490	2.043

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai tolerance transparansi sebesar 0,510 dan nilai VIP sebesar 1,961, nilai tolerance akuntabilitas sebesar 0,574 dan nilai VIP sebesar 1,744, nilai tolerance responsibilitas sebesar 0,363 dan nilai VIP sebesar 2,758, nilai independensi sebesar 0,353 dan nilai VIP sebesar 2,832, nilai tolerance kewajaran 0,490 dan nilai VIP sebesar 2,043. Hasil ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai tolerance $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.777	.569		1.365	.176
	TR	.025	.071	.041	.354	.724
	AK	.119	.080	.165	1.501	.137
	RP	.015	.074	.028	.199	.843
	IN	-.044	.033	-.159	-1.329	.187
	KW	-.029	.067	-.052	-.434	.666

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi semua variabel bebas lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Uji F

**Tabel 8
Hasil Uji F
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	794.046	5	158.809	66.683	.000 ^b
	Residual	242.917	102	2.382		
	Total	1036.963	107			

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 8 uji F menunjukkan semua variabel bebas (TR, AK, RP, IN, KW) yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (KL). Uji ini dapat dilihat pada nilai F test sebesar 66.683 dan signifikansi $\leq 0,05$ yaitu 0,000. Sehingga model pada penelitian ini layak untuk uji selanjutnya.

Uji Koefisien Determinasi (Adjuster R2)

**Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.875 ^a	.766	.754	1.54322

Sumber: Data

diolah (2022)

Berdasarkan hasil dari Tabel 9 di atas nilai Adjusted R Square sebesar 0,754 yang artinya variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 75,4%. Sedangkan sisanya sebesar 24,6% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian.

Uji T

Tabel 10
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.085	2.068		4.878	.000
	TR	.152	.142	.072	1.071	.287
	AK	.329	.160	.130	2.056	.042
	RP	.174	.149	.093	1.171	.244
	IN	.579	.139	.335	4.156	.000
	KW	.806	.134	.412	6.013	.000

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang ditunjukkan pada Tabel 10 dapat dijelaskan sebagai berikut

:

- 1) Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa
Tabel 10 menunjukkan bahwa variabel Transparansi (TR) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,152, nilai statistik t sebesar 1,071 dan tingkat signifikan sebesar 0,287 yang lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja lembaga perkreditan desa, sehingga H₁ ditolak.
- 2) Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa
Tabel 10 menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas (AK) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,329, nilai statistik t sebesar 2,056 dengan tingkat signifikan sebesar 0,042 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja lembaga perkreditan desa, sehingga H₂ diterima.
- 3) Pengaruh Responsibilitas Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa
Tabel 10 menunjukkan bahwa variabel Responsibilitas (RP) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,174, nilai statistik t sebesar 1,171 dengan tingkat signifikan sebesar 0,244 yang lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa responsibilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja lembaga perkreditan desa, sehingga H₃ ditolak.
- 4) Pengaruh Independensi Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa
Tabel 10 menunjukkan bahwa variabel Independensi (IN) memiliki nilai koefisien sebesar 0,579, nilai statistik t sebesar 4,156 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Independensi berpengaruh positif terhadap kinerja lembaga perkreditan desa, sehingga H₄ diterima.
- 5) Pengaruh Kewajaran Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa
Tabel 10 menunjukkan bahwa variabel Kewajaran (KW) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,806, nilai statistik t sebesar 6,013 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja lembaga perkreditan desa, sehingga H₅ diterima.

Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa

Hipotesis pertama (H₁) menyatakan bahwa Transparansi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan uji t yang dilakukan, variabel

Transparansi menunjukkan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa, hal ini dibuktikan oleh variabel Transparansi memiliki koefisien regresi sebesar 0,152, dengan nilai signifikansi sebesar 0,287 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak.

Hal ini berarti tinggi atau rendahnya transparansi tidak mempengaruhi Kinerja LPD, disebabkan karena sumber daya manusia dan sistem yang diterapkan di LPD sudah baik. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaktransparan LPD dalam hal mengungkapkan informasinya, tidak mempengaruhi kepercayaan stakeholder dalam hal ini krama desa terhadap pengurus LPD. Hal tersebut disebabkan karena kinerja LPD sudah optimal, dapat dilihat dari pengurus Lembaga Perkreditan Desa dapat menyediakan laporan keuangan tepat waktu, memadai dalam hal penyajian informasi keuangan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Dewi dan Putri (2014), Suarmika, dkk (2019), Bulandari dan Damayanthi (2014) menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG berpengaruh pada kinerja keuangan LPD Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Irwondy (2014) dan penelitian Handayani, dkk (2020) yang menyatakan bahwa Transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri dan Putra (2017) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan uji t yang dilakukan, variabel Akuntabilitas memiliki koefisien regresi sebesar 0,329, dengan nilai signifikansi sebesar 0,042 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. yang berarti bahwa hipotesis kedua (H2) diterima.

Akuntabilitas (accountability) Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan uji t yang dilakukan, variabel Akuntabilitas memiliki koefisien regresi sebesar 0,329, dengan nilai signifikansi sebesar 0,042 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. yang berarti bahwa hipotesis kedua (H2) diterima.

Akuntabilitas (accountability) Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, yaitu dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Bulandari dan Damayanti (2014), Dewi dan Dwijayanti (2014) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradnya dan Putri (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif pada kinerja keuangan koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas maka kinerja LPD akan semakin baik diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, yaitu dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Bulandari dan Damayanti (2014), Dewi dan Dwijayanti (2014) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradnya dan Putri (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif pada kinerja

keuangan koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas maka kinerja LPD akan semakin baik.

Pengaruh Responsibilitas terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa Responsibilitas tidak berpengaruh terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan uji t yang dilakukan, variabel Responsibilitas menunjukkan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa, hal ini dibuktikan oleh variabel Responsibilitas memiliki koefisien regresi sebesar 0,174, dengan nilai signifikansi sebesar 0,244 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis pertama (H3) ditolak.

Hal ini berarti tinggi atau rendahnya responsibilitas tidak akan mempengaruhi Kinerja LPD ini dikarenakan pengawasan LPD yang diterapkan sangat baik dan konsisten dalam pengawasan LPD tersebut. Dimana pengawasan yang baik akan menghasilkan output yang baik untuk menghindari kemungkinan adanya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan. Hal ini menunjukkan bahwa berpengaruh atau tidaknya responsibilitas dalam menjalankan oprasinya tidak mempengaruhi kinerja LPD. Hal tersebut disebabkan karena kinerja LPD sudah optimal.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Setyawan dan Putri (2013), Bulandari dan Damayanti (2014), Handayani, dkk. (2020) yang menyatakan bahwa responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Menurut Anggiriawan dan Kawisana (2020) menyatakan responsibilitas berpengaruh positif. Namun hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suarmika, dkk (2019), Ariani, dkk (2020), Irwandi dan Hubeis (2016), yang menyatakan responsibilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD.

Pengaruh Independensi terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa

Hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa indenpedensi berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan uji t yang dilakukan, variabel indenpedensi memiliki koefisien regresi sebesar 0,579, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. yang berarti bahwa hipotesis kedua (H4) diterima.

Prinsip dasar untuk melancarkan pelaksanaan asas independensi, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Dengan memperhatikan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, dan tidak saling melempar tanggung jawab, maka kinerja LPD akan meningkat. Selain itu Masing-masing organ perusahaan harus menghindari dominasi, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas dari conflict of interest dan segala pengaruh atau tekanan, untuk menjamin pengambilan keputusan yang objektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Setyawan dan Putri (2013), Dewi dan Dwijayanti (2014), Bulandari dan Damayanti (2014), Sandraningsih dan Putri (2015) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik independensi maka kinerja LPD akan semakin baik.

Pengaruh Kewajaran terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa

Hipotesis kelima (H5) menyatakan bahwa kewajaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan uji t yang dilakukan, variabel kewajaran memiliki koefisien regresi sebesar 0,806, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. yang berarti bahwa hipotesis kedua (H5) diterima.

Kewajaran Dalam menjalankan kegiatannya perusahaan harus mengikuti prinsip kewajaran dan kesetaraan serta selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa LPD harus senantiasa memperhatikan hak-hak para pemangku kepentingan be Hipotesis kelima (H5) menyatakan bahwa kewajaran

berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan uji t yang dilakukan, variabel kewajaran memiliki koefisien regresi sebesar 0,806, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. yang berarti bahwa hipotesis kedua (H5) diterima.

Kewajaran Dalam menjalankan kegiatannya perusahaan harus mengikuti prinsip kewajaran dan kesetaraan serta selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa LPD harus senantiasa memperhatikan hak-hak para pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan kinerja LPD kearah yang lebih baik.

Penelitian ini sejalan dengan Anggiriawan dan Kawisana (2020), Ardiani, dkk (2021) yang mengatakan bahwa kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kewajaran maka kinerja LPD akan semakin baik.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh dari Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja LPD Di Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. Pemilihan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh dari 36 LPD yang masih beroperasi, di masing-masing LPD Kecamatan Tembuku sehingga responden dalam penelitian ini adalah 108. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan:

1. Transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli.
2. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli.
3. Responsibilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan di Desa Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli.
4. Independensi berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli.
5. Kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan nilai $R - Square Adjusted R^2$ yang diperoleh penelitian ini masih ada 24,6% variabel-variabel diluar model penelitian yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya seperti: Kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris.
2. Dengan mempertimbangkan pengaruh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran diantara lima variabel tersebut hanya variabel akuntabilitas, independensi dan kewajaran yang berpengaruh terhadap kinerja lembaga perkreditan desa. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi data untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait prinsip-prinsip GCG terhadap Kinerja LPD. Sehingga memberikan masukan dan pertimbangan kepada seluruh lembaga perkreditan desa di Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli untuk meningkatkan kinerja LPD tanpa mengabaikan faktor yang tidak berpengaruh salah satunya transparansi karena dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Selain itu LPD dapat meningkatkan responsibilitas dikarenakan perusahaan harus

mampu mempertanggungjawabkan segala hal yang berkaitan dengan aturan, hukum dan peraturan yang berlaku sebagai kontribusi hubungan hierarki internal perusahaan, pemangku kepentingan, masyarakat serta stakeholders lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggririawan, B. (2020). Pengaruh Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 69-74.
- Ardiani, G. A. L., Mendra, N. P. Y., & Saitri, P. W. (2021). Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sekecamatan Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(2), 101-111.
- Agus Dwiyanto. 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bali Tribune. Diposting 17 January 2020 dari <https://balitribune.co.id/content/lima-lpd-macet-akan-dibangunkan-dari-tidurnya>
- Bukhori, I., & Raharja, R. (2012). Pengaruh good corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2010) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Bulandari, I. G. A. W., & Damayanthi, I. G. A. E. (2014). Pengaruh prinsip-prinsip good corporate governance pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 8(3), 641-659.
- Dewi, K. K., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2014). Pengaruh penerapan prinsip-prinsip GCG pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Gianyar Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(3), 559-573.
- Handayani, N. K. P., Suryandari, N. N. A., & Putra, G. B. B. (2020). Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 2(1), 11-21.
- Ichsan. 2013. *Teori Keagenan (Agency Theory)*, 2013 (<https://bungrandhy.wordpress.com/2013/01/12/teori-keagenan-agencytheory/>)
- Irwondy, I. S., & Hubeis, M. (2016). Pengaruh Penerapan Konsep Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Non-Keuangan di Kantor Pusat PT Asuransi Jasa Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 7(2), 98-110.
- Jensen, M. C. dan W. H. Meckling (1976). "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure." *Journal of Financial Economics* 3(4): 305-360
- Mahaendrayasa, P. K. A., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2017). Pengaruh prinsip-prinsip good corporate governance terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(2), 970-995.
- Mangkunegara, A.P. (2010), "Evaluasi Kinerja SDM". Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Masitoh, N. S., & Hidayah, N. (2018). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Tekun*, 1(1), 49-57.
- Merawati, LK, & Putra, IGC (2019, Februari). Meningkatkan Kinerja LPD Untuk Memperkuat Eekonomi Perdesaan. Dalam *The 9th International Conference Rural Research & Planning Group* (hlm. 273-278)